

**PERSEPSI MASYARAKAT BANYUWANGI DAN BLITAR
TENTANG KEHARMONISAN BERAGAMA**

***PERCEPTION OF BANYUWANGI AND BLITAR SOCIETY
ON RELIGIOUS HARMONY***

Latifah¹, Wina Dhamayanti², Kadek Yudi Murdana³, Rakyan Paranimmita S. Kamanitra⁴,
Nindyo Budi Kumoro⁵

Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa, Malang, Indonesia

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

efi.latifah@gmail.com¹, winadhamma@gmail.com², kadek7@gmail.com³,

rakyanparanimmita@gmail.com⁴, doni.kumoro@ub.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persepsi keharmonisan beragama masyarakat Banyuwangi dan Blitar, Jawa Timur. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana tingkat penerimaan masyarakat atas kenyataan keberagaman di Indonesia, khususnya dalam hal kehidupan beragama, dan bagaimana sikap masyarakat menghadapi berbagai dampak atas keberagaman agama tersebut demi mewujudkan kerukunan antar-beragama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah analisis frekuensi (jumlah) minimum dan maksimum dan perbandingan frekuensi relatif (persentase) dua kelompok data, yaitu masyarakat di Blitar dan Banyuwangi. Penelitian ini menunjukkan (1) semakin kritisnya masyarakat melihat masalah dalam hubungan antaragama, (2) masyarakat melihat bahwa kewajiban untuk menjaga hubungan, kebersamaan, dan saling membantu merupakan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, (3) wawasan tentang agama lain sangat penting untuk mengembangkan keharmonisan beragama dengan tidak hanya menghindari prasangka buruk, tetapi juga membangun rasa empati terhadap umat agama atau keyakinan lain. Untuk itu, forum antarumat beragama juga perlu lebih berbasis pada masyarakat.

Kata Kunci: Keharmonisan Beragama, Persepsi, Banyuwangi, Blitar

Abstract

This study examines the perception of religious harmony in the Banyuwangi and Blitar communities, East Java. The aim is to find out about the level of acceptance of Banyuwangi and Blitar people on the reality of diversity of beliefs and religions in Indonesia. In addition, this paper also looks at how the attitudes of the two communities face various impacts on diversity to create inter-religious harmony. With a quantitative descriptive approach through analysis of minimum and maximum frequency (number) and comparison of relative frequencies (percentages) of two data groups, namely Blitar and Banyuwangi communities, this study shows that people in these two cities: (1) are increasingly critical in seeing problems in relations between-religion; (2) see that maintaining relationships, togetherness, and mutual assistance is an obligation in social life; In addition, (3) insights about other religions are very important to develop religious harmony by not only avoiding prejudice, but also building empathy for people of other religions or beliefs. Putting this into consideration, this research suggests that the existing interfaith forum needs to be more community based.

Keywords: Religious Harmony, Perception, Banyuwangi, Blitar

PENDAHULUAN

Jiwa masyarakat Indonesia yang cinta kedamaian melalui perwujudan nilai-nilai keselarasan terepresentasikan dalam Pancasila yang penting peranannya sebagai landasan berbangsa dalam masyarakat Indonesia yang plural. Inspirasi nilai-nilai keselarasan ini diakui banyak diinspirasi dari masyarakat Jawa sebagaimana dipaparkan oleh Magnis-Suseno (1984). Aspirasi ini di satu sisi dapat dipandang sebagai suatu kearifan lokal yang menjadi modal dalam hidup bermasyarakat, bahkan bernegara. Namun, dalam konteks yang lebih luas, universalitas kebudayaan ini juga mempunyai potensi risiko karena dapat menimbulkan kecenderungan sentralisasi budaya Jawa yang berakibat mendistorsi ekspresi kebudayaan lain. Nilai ini juga berpotensi sebagai legitimasi kelompok mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai keselarasan sebagai perwujudan Pancasila perlu dilakukan secara terus-menerus dan dinamis sesuai dengan konsepsi Kawasan Nusantara.

Keharmonisan atau keselarasan mengacu pada “keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, ketaatan karena masing-masing unsur yang terlibat melaksanakan peran dan fungsi secara tepat, sehingga timbul rasa nikmat dalam suasana damai” (Lemhanas, 2019: 40). Namun, meskipun merupakan kata benda-abstrak, keselarasan tidak hanya bermakna suatu keadaan atau kondisi yang telah terberi atau secara alamiah kita dapatkan. Keselarasan juga bermakna kata kerja aktif sebagai “kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah atau kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural/majemuk”. Dengan demikian, tiap-tiap masyarakat juga memiliki persepsi sendiri tentang keharmonisan sosial yang dibentuk oleh internalisasi dan penghayatan atas nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Persepsi masyarakat tentang keharmonisan sosial ini perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan masyarakat atas kenyataan keberagaman di Indonesia, khususnya dalam hal kehidupan beragama, dan bagaimana sikap masyarakat menghadapi berbagai dampak atas keberagaman agama tersebut demi mewujudkan kerukunan antar-beragama. Untuk itu, penelitian ini mengkaji persepsi keharmonisan beragama masyarakat Banyuwangi dan Blitar, Jawa Timur. Seperti yang diungkapkan dalam *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur* (Ahmad, 2011), secara umum, Jawa Timur tidak menunjukkan eskalasi konflik beragama yang tinggi. Namun, beberapa kasus konflik antaragama seperti kasus Ahmadiyah di Tulungagung, Syiah di Sampang dan Bondowoso, penolakan pembangunan rumah ibadah hingga aksi terorisme di Surabaya menunjukkan kerawanan terjadinya gangguan hubungan antar-agama. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk melihat lagi situasi harmoni dari perspektif masyarakat itu sendiri.

Wilayah pedesaan yang cukup representatif dalam membahas persepsi keharmonisan umat Buddha di Jawa Timur terletak di Kabupaten Blitar dan Banyuwangi. Dua wilayah tersebut dapat menjadi representasi umat Buddha di pedesaan Jawa Timur karena merupakan kabupaten dengan penganut Buddha terbanyak di provinsi ini. Di Kabupaten Blitar, penganut agama Buddha berjumlah hampir tiga ribu jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Kebanyakan dari warga Buddhis ini terkonsentrasi di wilayah lereng Gunung Kawi, yakni Kecamatan Selorejo (682 jiwa) dan Kecamatan Ponggok (662 jiwa). Penganut Buddha pada kedua wilayah tersebut adalah nomor dua terbesar setelah Islam sebagai agama mayoritas di sana (BPS Kabupaten Blitar, 2017). Desa yang cukup dikenal adalah Boro di Kecamatan Selorejo, yang disebut sebagai desa *icon* toleransi umat beragama (*Kompas.com*, 11 Juni 2019).

Kesan positif juga muncul dalam banyak pembahasan tentang umat Buddha di Banyuwangi. Penganut agama Buddha di Banyuwangi lebih banyak, yakni berjumlah hampir sekitar 5000 jiwa dan tersebar di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota. Penganut Buddha terkonsentrasi di sekitar pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi yang berdekatan dengan Taman Nasional Alas Purwo, yakni di Kecamatan Gambiran (1271 jiwa), Pesanggaran (927 jiwa), maupun Tegaldlimo (338 jiwa) (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2017). Potret keharmonisan antara umat Buddha dan mayoritas (Islam) di pedesaan Banyuwangi lain telah banyak diulas. Salah satunya oleh Parastika dan Murdana (2017) yang menggambarkan interaksi rukun antara umat Buddha dan Islam di Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo. Kedua umat beragama tersebut sama-sama memiliki persepsi positif dengan tindakan seperti saling menghadiri hari raya dan undangan hajatan, musyawarah bersama untuk menghindari konflik, gotong royong membangun rumah ibadah, dan sebagainya.

Bagi komunitas petani pedesaan Jawa, rukun menjadi *modus vivendi* yang praktis dan tercapai melalui proses saling memberi dan menerima di antara orang yang hendak mementingkan dirinya sendiri (Geertz, 1983: 51). Mulder (1978, 39) mendefinisikan “rukun” pada orang Jawa sebagai “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tenteram”, tanpa perselisihan dan pertentangan, “bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Kerukunan atau situasi harmonis ini baru akan muncul dalam kondisi terdapat unit-unit (identitas) sosial berbeda dan otonom yang saling menjalin interaksi dalam sebuah sistem sosial (desa). Pola interaksi ini tidak lain adalah hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Lubis, 2004 dalam Ahmad, 2011).

METODE

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif dapat dipahami sebagai kegiatan mengelompokkan, membuat karakteristik sekumpulan data, dan memaknai data yang telah dikelompokkan tersebut (Salkind, 2016: 9) untuk menggambarkan kondisi kehidupan sosial yang dialami responden dalam representasi angka-angka yang memiliki makna sesuai dengan atribut sosial yang diberikan kepada angka tersebut. Secara lebih spesifik pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah analisis frekuensi (jumlah) minimum dan maksimum dan perbandingan frekuensi relatif (persentase) dua kelompok data. Dua kelompok data yang dimaksudkan di sini adalah kelompok data yang diperoleh dari masyarakat di Blitar dan kelompok data yang diperoleh dari masyarakat di Banyuwangi.

Frekuensi, frekuensi relatif, tabel, dan grafik kemudian dilengkapi dengan penjelasan untuk memaparkan kecenderungan umum komposisi data yang disertai dengan analisis yang dihubungkan kembali dengan tujuan penelitian dan studi pustaka yang telah dilakukan. Narasi deskriptif tersebut tentu saja mengandalkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah naratif deskriptif. Naratif deskriptif diperlukan juga untuk menunjang analisis data dan melakukan eksplorasi terhadap karakteristik khusus masyarakat yang dapat saja berbeda dengan temuan-temuan yang telah diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kecenderungan kuantitatif yang didasarkan pada data kuantifikasi hasil kuisioner. Data angka ini dipakai untuk menjawab masalah penelitian. Namun, untuk eksplorasi dan analisis, data kualitatif yang diperoleh dari informan dan catatan lapangan digunakan juga. Data ini dapat membantu menggali lebih dalam hasil dari data utama (data kuantitatif) dan

bahkan membantu menjawab masalah. Ini selaras dengan pernyataan Lee (1999 dalam Mulyana dan Solatun, 2008: 7) yang menyatakan bahwa pendekatan penelitian kuantitatif dapat disinkroniasi dan disajikan bersama dengan data kualitatif. Perpaduan tersebut membuat analisis dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat menggali makna lebih dalam dari data yang ada.

Data yang telah diperoleh dari kuisioner kemudian diperiksa kelengkapannya. Selanjutnya setiap kuisioner diberi kode nomor urut. Kode nomor urut satu sampai dengan 31 diberikan untuk kuisioner yang diperoleh dari Blitar dan kode nomor urut 32 sampai dengan 81 diberikan pada kuisioner yang diperoleh dari Banyuwangi. Item pertanyaan dan pilihan pada kuisioner selanjutnya dibuatkan daftar koding oleh tiap-tiap peneliti. Daftar koding tersebut kemudian didiskusikan dan divalidasi ulang secara bersama untuk memperoleh satu daftar koding yang disepakati. Berdasarkan daftar koding tersebut, data kemudian ditabulasi ke dalam lembar kerja Microsoft Excel 2016 oleh salah satu peneliti. Hasil tabulasi tersebut kemudian diperiksa ulang oleh peneliti yang lain. Berdasarkan tabulasi tersebut, kemudian dilakukan transformasi data ke dalam bentuk frekuensi menggunakan formula countif pada Excel dan fungsi persentasi untuk menghasilkan frekuensi relatif. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel-tabel kategori sesuai dengan nomor urut kolom pada lembar kerja Excel. Selanjutnya beberapa tabel kategori tersebut diubah sesuai dengan keperluan analisis dalam bentuk narasi atau grafik.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat kategori (bagian). Bagian pertama terdiri dari 11 pertanyaan, bagian kedua hingga bagian keempat terdiridari 9 pernyataan. Untuk setiap pertanyaan dan pernyataan tertutup ini, responden mempunyai 5 pilihan, yaitu sangat setuju; setuju; ragu-ragu; tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di samping itu, responden diberikan kebebasan (boleh menjawab atau tidak) untuk memberikan tanggapan, komentar, atau alasan atas pernyataan dan pertanyaan yang diajukan. Peneliti membuka seluas-luasnya kepada responden untuk memberikan komentar apapun untuk menangkap persepsi tentang keharmonisan beragama. Pernyataan-pernyataan dalam kuisioner merupakan adaptasi dari penelitian sejenis yang dilaksanakan oleh Rais (2012). Penelitian dilaksanakan Oktober-Desember 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi tentang keharmonisan agama masyarakat Banyuwangi dan Blitar yang disajikan dalam paper ini dikelompokkan dalam dua kategori: Kategori Eksistensi Agama dan Kategori Kebijakan Pemerintah. Kategori eksistensi agama mencakup enam pernyataan: penyebab konflik antar-agama adalah kesalahpahaman; bersedia berdamai pasca-konflik; kerja sama antar-agama dapat meredam konflik; dilarang menyebarkan agama kepada umat agama lain; pembangunan tempat ibadah umat agama lain dapat diterima melalui musyawarah; dan tokoh agama berperan mengatasi konflik antar-umat beragama. Kategori kebijakan pemerintah mencakup dua pernyataan: pemerintah tegas terhadap kelompok garis keras dan pemerintah memfasilitasi dialog antarkelompok agama.

Kategori Eksistensi Agama

Pernyataan pertama, penyebab konflik antar-agama adalah kesalahpahaman. Responden Blitar lebih menunjukkan variasi tanggapan mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Sebanyak 32,26% responden menyatakan sangat setuju; 58,06% setuju; 3,23% ragu; 3,23% tidak setuju; dan 3,23% sangat tidak setuju. Responden

Banyuwangi menyatakan setuju (66%); sangat setuju (26%); dan ragu-ragu 8%. Selain karena tidak mengetahui masalah ini, ketidaksetujuan dan keragu-raguan responden juga disebabkan responden melihat bahwa tidak semua konflik antar-agama adalah kesalahpahaman. Jadi, tergantung pada jenis konfliknya. Dalam hal ini, terlihat bahwa masyarakat telah makin kritis melihat masalah dalam hubungan antar-agama. Responden yang menyatakan persetujuannya melihat bahwa egoisme memberikan andil dalam mendorong kesalahpahaman (20%). Keterangan lainnya adalah kurangnya komunikasi atau sosialisasi (14%). Rendahnya SDM dan kurangnya wawasan juga menjadi faktor penyebab yang signifikan (14%). Alasan lainnya adalah kurangnya keterbukaan, menyebarnya berita yang tidak bertanggung jawab (*hoax*), terlalu banyak perbedaan, merasa benar sendiri, dan adanya upaya memecah belah. Ada pula responden yang menyatakan saran bahwa masyarakat perlu berpegang pada kewajiban atau komitmennya masing-masing agar konflik ini tidak terjadi.

Pernyataan kedua, bersedia berdamai pasca-konflik. Responden Blitar tampak sangat yakin pada proses rekonsiliasi ini. Hal ini tampak pada responden sebesar 65,42% yang menyatakan sangat setuju dan 35,48% yang menyatakan setuju. Di sisi lain, sebesar 68% responden Banyuwangi menyatakan setuju; 30% menyatakan sangat setuju, dan 2% menyatakan ragu-ragu. Alasan utama persetujuan atas pernyataan ini adalah harapan untuk meraih kebaikan bersama melalui perdamaian (28%). Alasan lainnya beragam: agar tidak larut atau berkepanjangan dalam hal yang melelahkan; toleransi; saling memaafkan; demi keamanan; persatuan dan kebersamaan; solidaritas; saling memahami; menjaga keharmonisan; rukun itu indah; bahagia; harus terbuka, dan persaudaraan.

Pernyataan ketiga, kerja sama antar-agama dapat meredam konflik. Meskipun pernyataan ini bersifat positif, terdapat responden yang masih meragukannya. Terdapat 2% responden Banyuwangi yang menyatakan ragu-ragu karena ketidaktahuannya atas masalah ini. Selebihnya, 42% menyatakan sangat setuju dan 56% menyatakan setuju. Sementara itu, responden Blitar, seperti pada kategori sebelumnya, lebih menunjukkan keterbukaan dan kemauannya untuk mengulurkan dan bergandengan tangan. Sebanyak 80,65% reponden menyatakan sangat setuju dan 19,35% setuju. Alasan pokok atas persetujuan mereka adalah kebersamaan (24%). Alasan lainnya adalah bahwa hal ini merupakan sebuah realitas atau kondisi nyata di masyarakat, membangun hubungan baik, penting untuk masyarakat banyak, dan menghindari konflik. Ada juga yang memandangnya sebagai suatu prosedur (2%) dan sarana kehidupan masyarakat (7%) untuk terjaganya komunikasi (6%). Keyakinan terhadap agama berpengaruh dalam mendorong sikap ini, yang muncul dalam ungkapan “agama sangat berperan sebagai pandangan hidup” dan agama sumber perdamaian”. Namun, responden juga mengajukan prasyarat atas kerja sama antar-umat bergama ini, yaitu adanya saling keterbukaan (10%), saling pengertian (8%), dan “selagi berpegang pada Pancasila (2%)”.

Pernyataan keempat, dilarang menyebarkan agama kepada umat agama lain. Pernyataan yang merupakan norma dalam interaksi antar-umat beragama ini mendapat tanggapan yang cukup beragam baik dari responden Blitar maupun Banyuwangi. Responden sebanyak 64,52% menyatakan sangat setuju; 32,26% setuju; dan ragu-ragu 3,23%. Di pihak lain, sebanyak 18% responden menyatakan sangat setuju, 72% setuju; 6% ragu-ragu; 2% tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Ketidaksetujuan ini dilatarbelakangi pandangan bahwa “menyampaikan hal baik adalah kewajiban” dan “untuk menyebar kebaikan”. Dalam hal ini, menyebarkan agama diidentikkan dengan menyebar

kebijakan sehingga tidak perlu ada pembatasan. Responden yang memiliki keragu-raguan memandang bahwa hal ini adalah hak individu (14%) dan terkait dengan prinsip masing-masing (10%). Di sisi lain, jaminan atas kebebasan pribadi dalam beragama ini juga menjadi alasan untuk mendukung larangan menyebarkan agama kepada umat agama lain. Sebanyak 26% menjawab hak asasi sebagai alasan persetujuannya. Alasan lainnya adalah bahwa setiap agama sudah terlindungi, menghindari salah paham/konflik, keseimbangan, dapat memecah belah, peraturan agama, semua agama sama, diatur dalam UU, belum tentu mau diterima, dan merusak toeransi agama. Sebanyak 6% responden juga menyatakan persetujuannya dengan alasan bahwa tujuan membicarakan keyakinan agama lebih sebagai dialog agama untuk menambah informasi atau pengetahuan.

Pernyataan kelima, pembangunan tempat ibadah umat agama lain dapat diterima melalui musyawarah. Pernyataan bernada positif ini secara umum diterima oleh hampir semua responden, namun masih ada keragu-raguan dalam menanggapi. Sebanyak 48,39% responden Blitar menyatakan sangat setuju dan 51,61% setuju. Responden Banyuwangi sebanyak 14% menyatakan sangat setuju; 84% setuju; dan 2% ragu-ragu. Namun, tidak ada nada pertentangan dalam keragu-raguan ini. Responden pun hanya menekankan perlunya musyawarah. Penekanan ini dapat diartikan bahwa musyawarah itu justru perlu dilaksanakan untuk membuka kemungkinan tidak diterimanya usulan pembangunan tempat ibadah. Jadi, musyawarah tidak selalu harus meluluskan rencana pembangunan tempat ibadah. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah sering kali lebih merupakan masnifestasi keinginan kelompok mayoritas sehingga kebutuhan kelompok minoritas kurang terepresentasi. Di sisi lain, pandangan bahwa musyarawarah itu perlu juga menjadi alasan utama untuk mendukung musyawarah dalam pendirian rumah ibadah (24%) karena musyawarah mampu melahirkan mufakat (20%). Alasan lainnya adalah mengantisipasi masalah, supaya aman, asas manfaat, demi kepentingan warga yang beragama lain, jalan tengah, menghindari perselisihan, dan wujud keterbukaan.

Pernyataan keenam, tokoh agama berperan mengatasi konflik antar-umat beragama. Pernyataan ini juga mendapatkan tanggapan yang variatif. Sebanyak 67,74% responden dari Blitar sangat setuju; 29,03% setuju, dan 3,23% ragu-ragu. Di lain pihak, penolakan muncul dari responden Banyuwangi. Sebanyak 2% responden menyatakan tidak setuju dan 2% ragu-ragu. Di luar itu, 22% menyatakan sangat setuju dan 74% menyatakan setuju. Kurangnya pemahaman atas masalah ini melatari keragu-raguan responden tersebut, sementara adanya penolakan terhadap pernyataan ini dilatari pendapat bahwa semua berhak mengemukakan pendapat. Dengan demikian, meskipun relatif kecil, ada kemungkinan penolakan masyarakat terhadap dominasi tokoh agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kategori Kebijakan Pemerintah

Pernyataan pertama, pemerintah tegas terhadap kelompok garis keras. Sebesar 74,19% responden Blitar menyatakan sangat setuju; 16,13% menyatakan setuju; dan 9,68% ragu-ragu. Responden Banyuwangi sebesar 38% menyatakan sangat setuju, 54% menyatakan setuju, dan 8% menyatakan ragu-ragu. Mencegah konflik menjadi alasan utama (22%) dukungan masyarakat terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok garis keras. Alasan lainnya, yaitu sebesar 14%, kelompok garis keras meresahkan/mengancam/merusak persatuan. Responden juga mendukung tindakan tegas itu untuk mengurangi kelompok radikal (2%) karena menganggapnya sebagai sumber masalah atau ancaman (8%). Alasan lainnya adalah bahwa tindakan tegas tersebut

merupakan kewajiban pemerintah (6%) sebagai wujud menjalankan UUD (4%) dan agar tidak ada penyalahgunaan (6%). Responden lainnya menyatakan hal ini bukanlah masalah (8%) dan kurang tahu masalah ini (8%).

Pernyataan kedua, pemerintah memfasilitasi dialog antar-kelompok agama. Jumlah responden Blitar yang menyatakan sangat setuju dan setuju sama, yaitu 48,39%, sementara 3,23% menyatakan ragu-ragu. Responden Banyuwangi menyatakan sangat setuju 22% dan setuju 78%. Terciptanya kerukunan, contohnya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), merupakan alasan utama persetujuan responden (14%). Alasan lainnya adalah untuk mempermudah atau memperlancar pertemuan(10%). Responden lainnya memandang bahwa hal ini sudah merupakan kewajiban pemerintah (10%). Senada dengan hal itu, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat mengharapkan agar konflik tidak berkepanjangan, masukan-masukan lintas-agama terakomodasi, terciptanya keadilan/pemerataan, tersebarnya informasi/pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Tokoh agama di Blitar pun mengharapkan bahwa FKUB yang telah berdiri di tingkat bawah sekarang tidak hanya menjadi ikon desa wisata kerukunan beragama, tapi bisa berperan maksimal (Wawancara 26 November 2018).

Pernyataan ketiga, pemerintah melakukan sosialisasi peraturan tentang kerukunan dan pendirian rumah ibadah. Sebanyak 54,84% responden Blitar menyatakan sangat setuju dan 41,94% setuju, sedangkan 3,23% ragu-ragu. Di sisi lain, responden Banyuwangi menyatakan sangat setuju sebanyak 16% dan setuju 74%, sementara 10% menyatakan ragu-ragu. Agar tidak salah paham atau terjadinya polemik merupakan alasan utama persetujuan responden (14%). Alasan lainnya yang mendukung hal ini adalah perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu; keterbukaan; supaya tidak ada kendala pembangunan; supaya tertata baik, merasa terlindungi, supaya masing-masing merasa diakui, mempunyai kesamaan visi dan misi, dan terjalinnya kerja sama pemerintah dan agama.

Pernyataan keempat, pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh agama. Sebesar 58,06% responden Blitar menyatakan sangat setuju, 35,48% setuju, dan 6,45% ragu. Di pihak lain, responden Banyuwangi menyatakan sangat setuju (32%) dan setuju (68%). Perlu adanya musyawarah, peran tokoh agama sebagai penasihat agama, menciptakan hubungan yang baik/kebersamaan, dan saling melengkapi merupakan alasan pokok responden mendukung perlunya pemerintah bekerja sama dengan tokoh agama. Responden juga berharap dengan adanya kerja sama ini masalah bisa cepat terselesaikan, agama-agama atau keyakinan terepresentasikan, sehingga “pemerintah tahu agama-agama di Indonesia. Dengan demikian, ada anggapan bahwa pemerintah perlu lebih mengembangkan jaringan kerja samanya di masyarakat agar kebutuhan masyarakat terakomodasi.

Pernyataan kelima, pemerintah membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) hingga ke tingkat bawah. Sebesar 61,29% responden Blitar menyatakan sangat setuju, 35,48% setuju, dan 3,22% ragu-ragu. Sebanyak 28% responden Banyuwangi menyatakan sangat setuju, 62% setuju, dan 10% ragu-ragu. Alasan utama pembentukan FKUB tersebut adalah kerukunan dan perdamaian (52%), alasan lainnya adalah bermanfaat bagi semua, wadah komunikasi, mempererat hubungan, menjadi penghubung, memberikan pengetahuan/wawasan, mengurangi kesenjangan, dan toleransi. Pendapat lain mengatakan bahwa FKUB justru dirintis dari bawah, sehingga lembaga ini tidak semata-mata lembaga bentukan pemerintah, tapi juga harus berbasis masyarakat.

Pernyataan keenam, pemerintah memasukkan muatan kerukunan dalam sekolah. Responden Blitar sebesar 51,61% menyatakan sangat setuju, sedangkan 45,16%

menyatakan setuju, dan ragu-ragu sebesar 3,22%. Responden Banyuwangi menyatakan sangat setuju sebesar 32%; setuju 64%; dan 4% ragu-ragu. Alasan utama mendukung hal ini adalah agar anak-anak mempunyai pengetahuan tentang kerukunan antar-umat beragama (36%). Alasan pokok lainnya adalah adanya kewajiban anak-anak untuk belajar (18%). Menekan pertikaian /perbedaan juga menjadi pertimbangan yang banyak dikemukakan (10%). Alasan lainnya adalah menekan kenakalan siswa, sebagai pembelajaran, dan terjalin kebersamaan tau kerukunan/toleransi, dan demi kelancaran pembangunan. Namun, ada pula komentar dari kelompok minoritas bahwa kurikulum ini tidak hanya bertitik berat pada “komunitas yang berkuantitas”. Dengan demikian, tampak bahwa pelajaran tentang kerukunan justru diidentikkan dengan konflik dan “kenakalan siswa”. Muatan tentang kerukunan baru dianggap penting diangkat justru karena adanya berbagai ancaman atau gangguan dan berbagai label negatif kepada anak-anak. Oleh karena itu, perlu lebih dikembangkan pendidikan tentang kerukunan yang lebih berbasis nilai-nilai perdamaian, cinta, dan harmoni daripada “gangguan keamanan” atau penangkalan kenakalan anak-anak.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat makin kritis terhadap masalah relasi antaragama. Terkait sumber konflik antaragama, sebagian besar masyarakat setuju bahwa sumber konflik adalah kesalahpahaman yang antara lain berhubungan dengan kurangnya wawasan dan menyebarnya *hoax*. Namun, masyarakat juga mencermati sebab lainnya yaitu sikap merasa benar sendiri, tingginya egoisme, serta perlunya menjalankan komitmen masing-masing. Dimensi afektif ini menjadi latar juga dalam aspek relasi antar-agama lainnya seperti kesediaan berdamai pasca-konflik, kesediaan melakukan kerja dengan agama lain, dan pembangunan tempat ibadah.

Dalam hal ini, literasi keagamaan perlu didukung oleh pengembangan sikap empati terhadap agama atau kelompok lain sehingga satu pihak tidak merasa superior atas pihak lain. Kelompok yang lain pun tidak perlu merasa ditinggalkan atau ditekan kelompok lain sehingga memendam prasangka dan inferioritas. Nilai-nilai *tepo seliro* dan kegotongroyongan dapat diaktualisasikan dengan pengembangan pendidikan nilai (*living values education*) sehingga keharmonisan dan toleransi antar-agama tidak sebatas jargon elite, tetapi mengakar dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Haidlor Ali (ed.). (2011). *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur Ed. I. Cet. 1*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kabupaten Blitar dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar (2017). *Kecamatan Selorejo dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2017). *Kecamatan Ponggok dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (2017). *Kecamatan Gambiran dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Geertz, Hildred. (1983). *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2019). *Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila*. Jakarta: Lemhanas.
- Magnis-Suseno, Frans. (1984). *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Mulder, Niels. (1978). *Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change*. Singapore: Singapore University Press.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. (2008). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda.
- Parastika, M Intan, dan Kadek Y Murdana. (2017) “Tingkat Keharmonisan Interelasi Umat Buddha dengan Umat Islam di Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi” dalam Hipolitus K. Kewuel (ed), *Seri Studi Kebudayaan 1: Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi*. Prodi Antropologi Universitas Brawijaya Malang.
- Rais, Muhammad. (2012). *Indeks Kerukunan Antar-Umat Beragama di Kalimantan Timur. Analisa*, vol. 19 No. 2 Juli-Desember 2012.
- Salkind, Neil J. (2017). *Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics: Using Microsoft Excel 2016*. 4th Edition. Los Angeles: Sage.
- Werdiono, Defri. (2020) “Toleransi dari Hati”. <https://kompas.id/baca/utama/2019/06/11/warga-boro-merawat-toleransi-dari-hati-2/>. Diakses pada 1 Maret 2020.